

PENDIDIKAN EMANSIPATORIS DAN MASYARAKAT MADANI

Rukiyati

L. Andriyani

FIS Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Masyarakat madani pada hakikatnya adalah bentuk masyarakat yang dialogis emansipatoris sekaligus mandiri. Masyarakat madani merupakan arena, tempat berbagai gerakan sosial yang mengekspresikan diri dalam suatu himpunan untuk memajukan kepentingan mereka.

Untuk menuju masyarakat ini diperlukan suatu transformasi sosial yang salah satunya adalah pendidikan. Selama ini realitas pendidikan di Indonesia belum memadai untuk mencapai suatu masyarakat madani. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan paradigma pendidikan, yaitu pendidikan yang bersifat emansipatoris. Teori Komunikasi Habermas menjadi salah satu alternatif dalam rangka memperbaharui paradigma pendidikan di Indonesia.

Implementasi teori komunikasi Habermas di dalam pendidikan dapat diwujudkan di dalam proses belajar mengajar. Proses ini menuntut dipenuhinya klaim-klaim komunikasi yang meliputi kebenaran, ketepatan, kejujuran/ketulusan dan keterpahaman. Di dalam proses belajar mengajar yang memenuhi klaim-klaim komunikasi akan terlihat dimensi-dimensi: *interest*, diskursus, konsensus dan emansipasi yang membawa pendidik (guru) dan peserta didik ke arah "refleksi diri".

Kata kunci: pendidikan emansipatoris, teori komunikasi Habermas, masyarakat madani

EMANCIPATORY EDUCATION AND THE CIVIL SOCIETY

ABSTRACT

The civil society is basically a society which is dialogue-oriented and emancipatory as well as independent in nature. It is an arena where various social movements express themselves in groups to proceed with their interests.

To come to such a society there needs to be a social transformation which involves, among others, education. All this time the educational realities in Indonesia have not been adequate for the formation of the civil society. Therefore, there needs to be a reformation of the educational paradigm so that education which is emancipatory in nature is achieved. Habermas' theory of communication can be one alternative means in the course of reforming the educational paradigm in Indonesia.

The implementation of Habermas' theory of communication in education can be made in the teaching-learning process. This process demands the fulfillment of the claims of communication concerning truth, rightness, sincerity, and comprehensibility. In the teaching-learning process which fulfils the claims of communication will appear the dimensions of interest, discourse, consensus, and emancipation which bring the teacher and students together to a self-reflection.

Pendahuluan

Kondisi pendidikan, khususnya pendidikan formal di Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis sebagai akibat kondisi politik yang krisis. Berbagai pernyataan dari para ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh LSM yang nadanya "menggugat" dunia pendidikan mulai muncul di berbagai media massa dan forum-forum ilmiah. Penolakan terhadap EBTANAS, pendidikan kita tidak demokratis, pendidikan di Indonesia hanya mencetak tukang dan masih banyak lagi gugatan yang lain, menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi krisis dalam dunia pendidikan kita. Berbagai fenomena di atas tentunya menjadi keprihatinan bersama bangsa Indonesia.

Dalam konteks reformasi, masyarakat madani merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi. Wacana tentang masyarakat madani di Indonesia secara intensif terjadi sejak awal dasawarsa 90-an (Masykuri Abdillah, Kompas, 27 Februari 1999). Masyarakat madani pada hakikatnya merupakan bentuk masyarakat yang dialogis-emansipatoris dan mandiri. Dengan kata lain, suatu masyarakat yang demokratis. Untuk menuju ke masyarakat ini diperlukan berbagai prasyarat, salah satunya adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia agar terkondisikan untuk hidup mandiri di alam yang demokratis tersebut. Dalam hal ini, dunia pendidikan merupakan wahana utama untuk pembentukan insan-insan yang mandiri dan demokratis. Dengan demikian pendidikan yang diperlukan dalam upaya menuju masyarakat madani adalah pendidikan yang bersifat emansipatoris (membebaskan, memerdekakan manusia).

Dalam kenyataan, pendidikan kita justru membentuk peserta didik yang tidak dewasa, tidak berdaya (tidak emansipatoris), misalnya: "membebek", menjadi robot dan tukang, moralitas dan budi pekerti rendah sebagaimana banyak gugatan selama ini.

Masalah ini diawali oleh kesalahan yang esensial, yaitu berkaitan dengan paradigma pendidikan. Oleh karena itu, mereformasi paradigma pendidikan merupakan hal yang urgen menuju masyarakat madani.

Tulisan ini ingin memberi suatu alternatif perubahan paradigma pendidikan dengan menggunakan teori komunikasi Jürgen Habermas. Secara khusus ingin memaparkan bagaimana relevansi teori komunikasi Habermas sebagai sumbangan bagi perubahan paradigma pendidikan menuju masyarakat madani serta bagaimana implementasinya dalam proses belajar mengajar.

Realita Dunia Pendidikan Sekolah di Indonesia

Berbagai diskursus dari berbagai ahli menunjukkan bagaimana fenomena pendidikan sekolah di Indonesia. Kebijakan pendidikan formal pada masa Orde Baru tentang pendidikan siap pakai, *link and match*, adalah contoh-contoh kebijakan yang menunjukkan bahwa pendidikan kita tidak mengaktualisasikan potensi peserta didik sebagaimana yang menjadi esensi pendidikan, tetapi justru menempatkan pendidikan menjadi subordinat dunia industri dan kapitalisme. Mangunwijaya sebagaimana dikutip Mutrofin (Bernas, 15 Februari 1999) dengan tegas mengkritik kebijakan pendidikan Indonesia sebagai pendidikan yang bermuara pada eksploitasi manusia dengan manusia lain. Sistem pendidikan sekolah tidak mendewasakan peserta didik, tetapi mencetak robot. Mangunwijaya dengan pedas mengatakan bahwa pendidikan kita bukan memerdekakan peserta didik, tetapi mencetak "pawang".

Dewasa ini masyarakat menganggap sekolah sebagai candu sosial dan menggantungkan nasib hidup anak-anaknya pada pendidikan sekolah. Sekolah merupakan satu-satunya harapan. Status sosial, prestis dan ukuran kualitas ditentukan oleh tingginya jenjang pendidikan sekolah. Dengan demikian gelar akademik lebih penting dari pada penguasaan ilmu dan moralitas akademik. Demi memperoleh gelar, seseorang boleh meninggalkan etika akademiknya (kasus penjiplakan karya ilmiah).

Disamping itu, sentralisasi pendidikan juga menghambat upaya demokratisasi. Pendidikan sekolah tidak membuka wacana kritik sehingga komunikasi

yang dialogis tidak terjadi. Pendidikan sekolah lebih menitikberatkan pada menghafal, tidak membuka peluang pada penalaran kritis. Dengan kurikulum nasional yang seragam, mengakibatkan tidak adanya otonomi akademik. Kurikulum yang sentralistik ini dalam implementasinya seringkali atau bahkan tidak aspiratif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Tilaar, 1998). Jika pendidikan kita menghasilkan anak didik yang suka "membebek", apatis, tidak kritis dan inovatif serta tidak kreatif, salah satunya disebabkan oleh kurikulum nasional dan proses belajar mengajar yang tidak aspiratif terhadap keragaman budaya dan potensi anak didik sebagai individu yang unik. Kebijakan pendidikan nasional menggunakan azas keseragaman, bukan azas kebhinnekaan sebagaimana kondisi sosial-budaya bangsa Indonesia yang plural. Demikian pula mengenai muatan kurikulum nasional. Drost, seorang ahli pendidikan mengatakan bahwa muatan kurikulum nasional untuk sekolah menengah di Indonesia sebenarnya hanya cocok untuk anak-anak yang pandai. Upaya "pemaksaan" kurikulum nasional untuk anak-anak dengan kemampuan sedang dan kurang hanya menghasilkan anak-anak yang apatis dan tidak bergairah untuk belajar. Dengan demikian, pendidikan bersifat elastis dan kurang aspiratif terhadap perbedaan kemampuan individual peserta didik. Azas kesetaraan dan kesamaan kesempatan tidak terealisasi di dalam dunia pendidikan.

Masyarakat Madani dan Teori Komunikasi Habermas

Banyak ahli memberikan pengertian yang berbeda tentang masyarakat madani: Giddens seperti dikutip Muslim Abdurahman (Kompas, 29 April 1999) mengataka ada dua pandangan tentang masyarakat madani: pandangan liberal dan kelompok teori kritis (yang biasanya menamakan diri sebagai sebagai kelompok radikal-demokrasi). Sebab yang terakhir ini mencari pengertian masyarakat madani sebagai bentuk aksi sosial kolektif dalam perspektif mencari gerakan sosial yang baru sebagai refleksi kelembagaan yang kontradiktif dengan modernitas. Kelompok teori kritis memandang masyarakat madani sebagai perwujudan kelompok-kelompok sosial dalam perspektif yang luas, tidak lagi didasarkan pada orientasi ekonomi sebagai mana pandangan liberal. Di dalam suatu masyarakat madani timbul kekuatan sosial masyarakat yang menjadi juru bicara bagi dirinya sendiri dan kelompoknya yang didasarkan identitas berbeda dengan *gender*, persoalan lingkungan hidup, ketidakadilan disebabkan rasialisme, kaum intelektual, dan sebagainya.

Sejalan dengan pendapat di atas, Alfred Stepan sebagaimana dikutip oleh Masykuri Abdillah (Kompas, 27 Pebruari 1999) berpendapat bahwa masyarakat madani adalah arena tempat berbagai gerakan sosial, seperti himpunan ketetanggaaan, kelompok wanita, kelompok intelektual serta organisasi sipil dari semua kelas yang menyatakan diri dalam satu himpunan sehingga dapat mengekspresikan diri dan memajukan kepentingan mereka. Idealnya, di dalam masyarakat madani terwujud kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial sehingga terwujud nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat terutama keadilan, persamaan, kebebasan/keterbukaan, dan kemajemukan (pluralisme). Hal yang hampir senada dikatakan Tilaar (1998: 28) masyarakat madani adalah masyarakat terbuka yang anggota-anggotanya sadar akan hakikat kemanusiaannya, bertanggung jawab terhadap kehidupannya, dan bukan berdasar pada paksaan dari sekelompok penguasa demi kepentingan dirinya sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang sadar akan kemampuan mereka sendiri (mandiri) yang diekspresikan dan disalurkan melalui kelembagaan demokrasi yang benar.

Masyarakat madani sebagai suatu gagasan atau cita-cita hanya dapat direalisasikan melalui suatu proses transformasi sosial. Salah satu bentuk transformasi sosial yang utama untuk mencapai masyarakat madani, menurut penulis adalah pendidikan yang emansipatoris-demokratis.

Selama ini realitas pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas, belum menunjukkan visi pendidikan yang emansipatoris-demokratis. Jika dimasukkan dalam kerangka pemikiran Max Weber (Veeger, 1982:63), pendidikan nasional Indonesia merupakan pendidikan yang menggunakan paradigma rasional-bertujuan, artinya segala sistem tindakan manusia (dalam hal ini proses pendidikan) diarahkan pada suatu tujuan yang masuk akal menurut kriteria tertentu oleh pihak tertentu. Akibat lebih jauh dari kondisi ini, terjadi ketidaksetaraan dan eksploitasi sehingga manusia tercabut dari hakikat kemanusiaannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari gejala madernisma. Persoalan pendidikan siap pakai merupakan salah satu contoh nyata.

Adanya konsep rasional-bertujuan mengakibatkan pendidikan bukan merupakan kegiatan penyadaran dan pengaktualisasian potensi diri peserta didik, tetapi penggiringan dan kepanjangan tangan dari kelompok pengusaha sehingga kedewasaan atau kemandirian peserta didik tidak tercapai.

Kondisi pendidikan yang tidak mendewasakan seperti itu tidak mungkin mencapai suatu masyarakat madani di Indonesia. Untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia agar dapat menuju masyarakat madani diperlukan paradigma baru dan usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Selama ini umumnya masyarakat kita senang dengan pencanangan gerakan-gerakan tanpa ada konsistensi dalam tindakan nyata. Paradigma tersebut adalah pendidikan yang emansipatoris, yaitu pendidikan yang bersifat memberdayakan dan membebaskan. Dengan kata lain, sebenarnya pendidikan emansipatoris bertujuan untuk mewujudkan pribadi mandiri. Drost (1998:39) mengatakan bahwa pribadi mandiri ialah dia yang tahu siapa dan apa dia itu. Jadi, seorang manusia yang tahu apa yang akan dilakukannya karena sadar apa yang dituju, pribadi yang utuh, dan tidak berantakan. Pribadi yang bahagia karena sadar bahwa ia berarti bagi sesama. Ia tahu dan menerima baik keunggulan maupun kelemahannya. Ia mempergunakan kemampuannya secara penuh. Dia tidak berkelit menghadapi kenyataan, tetapi sebaliknya, berani beradu dada dengan kenyataan. Manusia mandiri seperti pemerian di atas adalah gambaran ideal, tetapi tetap merupakan cakrawala ikhtiar manusia. Sedapat-dapatnya didekati, namun tetap sadar bahwa tidak akan pernah diraih secara penuh.

Memahami konsep pendidikan emansipatoris tidak dapat dilepaskan dari teori-teori sosial baru. Salah satu di antaranya yang relevan dan dapat dikembangkan di dalam paradigma (baru) pendidikan adalah teori komunikasi Jurgen Habermas.

Habermas adalah filsuf Jerman yang sangat terkenal saat ini, karena banyak gagasannya yang bersifat baru dan antisipatif terhadap problema sosial kehidupan modern, khususnya menyangkut proses komunikasi. Dipandang dari satu sisi, proses pendidikan pada hakikatnya adalah proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Tetapi di dalam hal ini, teori komunikasi Habermas memberikan perspektif baru yang sangat berguna untuk mencapai pendidikan yang bersifat membebaskan.

Habermas dalam bukunya yang berjudul *Theory of Communicative Action* menyebut 4 klaim komunikasi, yaitu: kebenaran (*truth*), ketepatan (*rightness*), kejujuran (*sincerity*), keterpahaman (*comprehensibility*). Setiap komunikasi yang efektif harus mencapai keempat klaim ini. Pertama, orang yang mampu berkomunikasi, dalam arti menghasilkan klaim-klaim ini dapat dipahami sesuai dengan aturan sintaksis dan semantik bahasa sehingga makna yang diutarakan dapat

dipahami. Kedua, bahwa isi pernyataan yang disampaikan benar adanya, menunjuk pada kenyataan. Ketiga, bahwa si komunikator berhak memberikan pernyataan karena sesuai dengan kompetensinya, keahliannya. Keempat, bahwa si komunikator sebagai pembicara jujur dan tulus dalamungkapannya, tidak ada maksud menipu komunikannya atau pendengarnya (Sudiarja, 1995: 30).

Dalam proses komunikasi tersebut tentu saja harus terjadi timbal balik antara komunikator dan komunikan. Klaim-klaim di atas berlaku untuk komunikator. Proses selanjutnya, di dalam komunikasi yang ideal harus memuat variabel-variabel komunikasi yang meliputi pamrih, rasionalisasi, diskursus, konsensus dan emansipasi. Pamrih (*interest*) dapat muncul dari mana saja, baik dari komunikator maupun komunikan. Habermas berpendapat bahwa setiap tindakan manusia tidak terlepas dari pamrih, tetapi pamrih harus diungkapkan dalam komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan keterbukaan pamrih dari para partisipan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan upaya membuka dimensi tersembunyi sehingga bersifat manusiawi. Pemahaman Habermas akan konsep komunikasi ini dilatarbelakangi oleh pandangannya yang menolak konsep rasionalitas-bertujuan dan mengembangkan rasionalitas-komunikatif. Bagi Habermas, tindakan manusia yang didasarkan konsep rasionalitas-bertujuan bersifat manipulatif dan itu hanya cocok untuk memperlakukan alam (dalam batas-batas tertentu), sedangkan tindakan komunikasi merupakan tindakan dasar dalam hubungannya dengan manusia sebagai sesama subjek. Tindakan rasional-komunikatif dikatakan berhasil jika tindakan ini mampu menghasilkan integrasi sosial yang berdasarkan "mutualitas".

Diskursus adalah suatu model perbincangan yang melibatkan partisipan komunikasi untuk memberikan tema terhadap pengujian validitas. Diskursus memberi peluang kepada para partisipan komunikasi untuk mengkritik dan mempersoalkan latar belakang konsensus yang tertuju kepada sistem nilai dan norma serta ideologi yang diterima kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari (Rick Roderick, 1986: 82). Habermas membedakan dua macam diskursus, yaitu diskursus teoretis (berkaitan dengan wacana bahasa) dan diskursus praktis (berkaitan dengan wilayah moral-praktis) (Hardiman, 1993: 48-49).

Komunikasi (Habermas, 1984: 20) adalah kesepakatan yang dibuat para partisipan komunikasi mengenai validitas kebenaran dan validitas ketepatan. Kebenaran bagi Habermas adalah kebenaran konsensus.

Komunikasi yang ideal bertujuan untuk memperoleh konsensus. Konsensus merupakan musyawarah dalam menerima bahan diskursus; pemaksaan kehendak tidak akan pernah terjadi. Demikian pula dominasi yang satu terhadap yang lain tidak akan terjadi dalam diskursus untuk mencapai konsensus. Emansipasi bukan semata-mata sebagai upaya pembebasan dari kendala-kendala sosial seperti perbudakan, kolonialisme, kekuasaan yang menindas, melainkan juga berkaitan dengan kendala internal, yaitu ketidaktahuan. Emansipasi dalam pandangan Habermas merupakan upaya memberdayakan manusia untuk lepas dari keterkungkungan budaya empiris dan rekonstruksi terhadap makna emansipasi yang telah dikenal sejak zaman Pencerahan dari Immanuel Kant.

Implementasi Teori Komunikasi Habermas di dalam Proses Belajar Mengajar

Teori komunikasi Habermas memang dimaksudkan untuk komunikasi. Pada umumnya Habermas tidak menunjuk secara khusus komunikasi di dalam proses pendidikan, tetapi gagasannya sangat menarik dan dapat diterapkan di dalam praksis pendidikan dengan interpretasi yang kontekstual.

Dalam proses pendidikan terdapat tiga komponen utama, yaitu tujuan pendidikan, strategi belajar mengajar dan penilaian atau evaluasi (Hajaroh, 1998: 1). Dua komponen yang akan ditinjau dalam kerangka Teori Habermas adalah tujuan pendidikan dan strategi belajar mengajar. Diskursus merupakan ajang dialog yang sangat tepat diterapkan di dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang emansipatoris. Dalam suatu diskursus akan dicapai saling pengertian intersubjektif yang membimbing ke arah "refleksi diri" sehingga tercapai pencerahan di dalam partisipan komunikasi. Bila diterapkan di dalam proses belajar mengajar di sekolah dapat dijelaskan demikian.

Di dalam proses belajar mengajar di kelas terdapat komunikasi langsung antara pendidik dan peserta didik. Seorang pendidik atau guru di dalam mengajar berusaha untuk mengajak peserta didik memahami materi ajar sehingga sampai ke taraf kesadaran peserta didik dalam rangka proses pembentukan dirinya menuju kedewasaan. Jadi, seorang guru membimbing peserta didik ke arah "refleksi diri" sekaligus refleksi untuk dirinya sendiri. Pengetahuan yang diperoleh dalam praktik komunikasi yang demikian adalah pengetahuan yang kritis. Untuk memperoleh kemampuan bernalar kritis, Paulo Freire berpendapat (Allen, 1998:12) bahwa pendekatan-pendekatan pengajaran tradisional sebagai

“pendidikan model bank”, yaitu sebuah proses di mana buku teks mendeposit bentuk-bentuk pengetahuan yang dominan dan formal pada benak para siswa yang pasif. Pendidikan model bank harus dihindari agar pendidikan emansipatoris dapat diwujudkan. Dalam konteks ini Allen (1998:13-14) berpendapat bahwa komunikasi atau percakapan yang sejati membutuhkan pertanyaan-pertanyaan, tugas-tugas dan masalah-masalah yang menantang. Guru harus menjadi contoh kesungguhan yang menggali berbagai perspektif, dan mengangkat berbagai teori yang berbeda-beda dan memberi penjelasan dari sumber yang sah. Peserta didik harus diberi kesempatan menggunakan perspektifnya, pengalaman pribadinya di dalam proses pencarian makna, gagasan dan solusi. Pengetahuan demikian penting untuk menghadapi “dogmatisme” atau “kesadaran palsu”. Dogmatisme tidak hanya terjadi karena kurangnya informasi (aspek kognitif), melainkan juga berkaitan dengan sikap (aspek afektif). Oleh karena itu, pemberian informasi saja (*transfer of knowledge*) tanpa dibarengi dengan sikap intelektual pendidik untuk mewujudkan klaim-klaim komunikasi (kebenaran, ketepatan, kejujuran, dan keterpahaman) tidak akan memberi efek penyadaran dalam diri peserta didik.

Proses diskursus akan menghasilkan kebenaran konsensus. Pada tahap ini, bila dikaitkan dengan proses belajar mengajar tampak di dalam kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh setelah terjadi proses dialog di dalam kelas. Proses dialog yang memenuhi klaim-klaim komunikasi tidak akan mengarah kepada indoktrinasi atau dogmatisasi pengetahuan. Hal demikian akan menuju kepada terrealisasinya konsep kesetaraan. Dengan kata lain, terjadi demokratisasi di dalam proses belajar-mengajar. Baik pendidik maupun peserta didik tidak merasa saling diperalat atau salah satu merasa dominan. Proses demikian akan menjadikan peserta didik sebagai manusia yang akan kritis, berani bertanya, dan kreatif.

Klaim-Klaim komunikasi dapat diterapkan dalam proses belajar-mengajar dengan syarat, dari pihak guru berupa sikap lapang dada, dapat menerima kritik, tidak otoriter, tidak memonopoli kebenaran, sedangkan dari pihak peserta dituntut keterlibatan yang optimal. Bila semua prosedur komunikasi dalam proses belajar mengajar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka tidak mustahil akan terwujud pendidikan yang emansipatoris.

Penutup

Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam praksis pendidikan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan proses belajar mengajar yang komunikatif-dialogis. Sebagai contoh, sistem CBSA merupakan salah satu model bagi terbukanya peluang untuk terjadinya komunikasi yang dialogis dalam proses belajar mengajar. Dalam kenyataan, sistem ini justru sering dipahami bahwa guru tidak aktif tetapi siswanya yang aktif sehingga CBSA sering diplesetkan menjadi Catat Buku Sampai Akhir. Peserta didik sendiri sering tidak siap dengan proses belajar mengajar yang dialogis, karena terlalu biasa “disuapi” dan “terima jadi”. Tetapi, walau bagaimanapun usaha yang sungguh-sungguh harus dimulai, pertama-tama dari sisi pendidik. Dalam hal ini, pendidikan yang emansipatoris yang di dalamnya memuat dimensi proses belajar mengajar yang mengarah kepada refleksi diri dan memberdayakan peserta didik sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan proses panjang dalam rangka mencapai masyarakat madani.

“Pekerjaan rumah” bagi para ahli pendidikan dan para pengambil kebijakan memang telah banyak. Tetapi, pendidikan emansipatoris yang di dalam proses belajar mengajarnya mensyaratkan adanya komunikasi dialogis yang mengacu pada klaim-klaim komunikasi pada akhirnya menuntut pula supervisi pendidikan. Kiranya perlu diberlakukan kebijakan supervisi langsung terhadap pendidik ketika melakukan proses belajar-mengajar. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkompeten, tetapi dapat pula oleh teman sejawat. Penelitian oleh Sukanto, dkk. (1998:205), menunjukkan bahwa *peer observation* dapat dikembangkan menjadi supervisi antarsejawat yang ternyata dapat mewujudkan proses peningkatan kompetensi guru. Selama ini supervisi terhadap pendidik dalam proses belajar-mengajar lebih dititikberatkan pada laporan administrasi.

Sebagai akhir kata, diskursus dan konsensus yang terdapat dalam teori komunikasi Habermas juga dapat diterapkan di dalam komunikasi antarpendidik (guru) sebagai ujung tombak pendidikan dengan pengambil kebijakan. Sudah waktunya semua kebijakan yang diambil oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan model diskursus Habermas agar diperoleh kebenaran konsensus antara pendidik dan pengambil kebijakan sehingga kebijakan yang keluar semakin aspiratif dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Rodney, F. (1998). *Social Science Teacher Education in an Era of Globalization*. Makalah. IKIP Yogyakarta.
- Budi, Hardiman, F. (1998). *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Drost, J. I. G. M. (1998). *Sekolah: Mengajar Atau Mendidik?* Yogyakarta: Kanisius.
- Habermas. (1994). *Theory of Communicative Action*. Vol. I. Boston: Beacon Press.
- Mami Hajaroh. (1998). *Analisis Kualitas THB Pendidikan Agama Islam Kelas V Sekolah Dasar di Ranting Dinas P & K Banguntapan, Bantul*. Laporan Penelitian: IKIP Yogyakarta.
- Maskuri Abdillah. (1999). Islam dan Masyarakat Madani. *Kompas*, 27 Februari. hlm. 4.
- Roderick, Rick. (1986). *Habermas and the Foundations of Critical Theory*. New York: St. Martin's Press.
- Sudiarja, A. (1995). *Filsafat Sosial*. Diklat Kuliah Pasca Sarjana UGM.
- Sukamto, dkk. (1998). Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika dan Remediasinya Melalui Penelitian Tindakan. *Jurnal Kependidikan* No. 2 Th. XXVIII, hlm. 187-208.
- Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Penerbit Terra.
- Veeger. (1982). *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia.